

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

### **1. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Lainnya dan Jasa serta Risiko Ke Depan**

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Tegal pada triwulan ketiga tahun 2024, masih dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal, baik yang berasal dari tingkat regional, nasional, maupun internasional, mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah ini. Kabupaten Tegal, seperti daerah lain di Indonesia, beroperasi dalam struktur ekonomi terbuka dan berpartisipasi aktif dalam kancah ekonomi global. Hal ini membuat Tegal rentan terhadap perubahan ekonomi global, khususnya karena ketergantungan pada bahan baku impor dan keterkaitan yang erat dengan pasar internasional.

Pada triwulan ketiga, harga barang kebutuhan pokok dan jasa penting lainnya mengalami variasi yang mencerminkan kondisi pasar dan sejumlah faktor eksternal serta internal. Setelah periode Lebaran pada pasca triwulan kedua terlewati, permintaan terhadap beberapa kebutuhan pokok, seperti : beras, minyak goreng, daging ayam, dan telur, mulai mengalami penurunan, yang menyebabkan stabilisasi bahkan sedikit penurunan harga pada komoditas-komoditas ini. Namun, komoditas tertentu seperti sayur mayur dan beberapa hasil pertanian lainnya masih mengalami fluktuasi harga karena dampak musim panen dan perubahan cuaca.

Di sisi lain, harga BBM yang tetap tinggi serta biaya distribusi dan logistik masih menjadi faktor yang memengaruhi biaya barang-barang kebutuhan pokok. Kenaikan biaya energi dan distribusi ini turut memengaruhi harga di pasar dan jasa transportasi, yang kemudian berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, triwulan ketiga biasanya mengalami peningkatan harga untuk komoditas seperti cabai dan bawang karena mulai masuk musim penghujan yang berdampak pada produksi pertanian. Produksi yang terbatas akibat kondisi cuaca ini memicu kenaikan harga komoditas yang sensitif terhadap perubahan iklim. Di beberapa wilayah, operasi pasar dilakukan untuk membantu stabilisasi harga pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.

Untuk harga jasa, khususnya jasa transportasi dan pariwisata, terdapat peningkatan aktivitas karena triwulan ketiga mencakup masa libur sekolah dan musim liburan. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi dan akomodasi, yang sedikit banyak memengaruhi harga-harga di sektor tersebut.

Pada Triwulan berikutnya, risiko utama terhadap harga barang kebutuhan pokok dan jasa meliputi faktor cuaca, ketidakpastian ekonomi global, dan potensi kenaikan harga energi. Memasuki musim penghujan pada akhir tahun, produksi beberapa komoditas pertanian yang sensitif terhadap cuaca dapat terganggu, yang akan berdampak pada pasokan dan harga di pasaran. Misalnya, cabai dan sayuran yang memerlukan kondisi cuaca tertentu akan lebih rentan terhadap perubahan harga.

Di tingkat global, inflasi dan ketidakpastian ekonomi di beberapa negara juga berpotensi

berdampak pada biaya impor bahan baku dan barang jadi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Ketergantungan Indonesia pada impor untuk beberapa komoditas dapat memperburuk situasi jika terjadi gangguan pada rantai pasok global.

Selain itu, faktor harga energi juga masih menjadi risiko, karena biaya bahan bakar dan energi lainnya langsung berdampak pada distribusi dan biaya produksi barang kebutuhan pokok. Apabila harga energi mengalami kenaikan signifikan, harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen akan terdampak, menurunkan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan harga pada triwulan ketiga relatif stabil namun tetap disertai beberapa kenaikan pada komoditas tertentu akibat cuaca dan biaya energi. Risiko ke depan akan bergantung pada bagaimana kondisi cuaca, harga energi, dan stabilitas ekonomi global berkembang, dengan pemerintah kemungkinan besar akan terus memantau situasi dan mengadakan langkah-langkah stabilisasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Faktor musiman, seperti hari besar keagamaan, juga menjadi penyebab utama lonjakan harga di Kabupaten Tegal.

Peningkatan permintaan ini terjadi sebagaimana dampak liburan sekolah pada bulan Juli. Sehingga berkontribusi pada inflasi harga barang secara jangka pendek. Pengaruh dari liburan sekolah ini perlu diantisipasi dengan menjaga stabilitas pasokan dan distribusi, agar harga komoditas pokok tetap stabil dan terjangkau. Penguatan stok barang dan pengawasan distribusi dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga selama periode tersebut.

Dampak El-Nina dan El-Nino sebagai anomali cuaca turut memperparah tantangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas. Intensitas curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah sejak akhir 2023 dan kekeringan di wilayah lain menyebabkan gangguan dalam produksi komoditas penting seperti cabai, bawang merah, dan beras. Kabupaten Tegal yang bergantung pada pasokan dari wilayah lain menjadi rentan terhadap fluktuasi stok dan kenaikan harga.

Ketergantungan pada impor untuk komoditas seperti bawang putih juga menjadi tantangan, karena fluktuasi nilai tukar dan keterbatasan pasokan global berdampak pada harga komoditas di pasar lokal. Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Tegal.

Pada triwulan ketiga tahun 2024, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan yang dipicu oleh berbagai faktor. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal, inflasi tertinggi terjadi pada komoditas utama seperti beras, cabai merah, minyak goreng, dan beberapa bahan pokok lainnya. Inflasi ini dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi dan berkurangnya pasokan akibat cuaca ekstrem di beberapa daerah produsen, yang berdampak langsung pada kenaikan harga di pasar lokal.

Perubahan harga selama periode Juli hingga September 2024 juga terlihat dari kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di Kabupaten Tegal. Pada bulan Juli, inflasi *year-on-year* tercatat sebesar 2,16%, dan inflasi terus meningkat hingga September, didorong oleh kenaikan biaya pangan dan energi. BPS bersama Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten Tegal ) Tegal

telah melakukan sejumlah upaya mitigasi, seperti operasi pasar dan pengawasan harga di pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, risiko dari fluktuasi harga ini juga berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal. Meningkatnya harga barang pokok menyebabkan beban ekonomi yang lebih berat bagi warga berpenghasilan rendah, sementara sektor usaha kecil turut terpengaruh oleh kenaikan harga bahan baku. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyoroti pentingnya edukasi konsumsi bijak untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi ini. Pemantauan dan pengawasan harga secara ketat juga diimplementasikan untuk mengatasi spekulasi harga di pasar.

Ke depan, kerja sama antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan strategis. Pemerintah Kabupaten Tegal berencana memperkuat sinergi lintas instansi untuk menekan risiko kenaikan harga barang, termasuk peningkatan frekuensi operasi pasar dan pembatasan praktik penimbunan oleh pedagang. Langkah-langkah ini ditujukan untuk meminimalkan dampak inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Tegal pada kuartal berikutnya

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### 1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Situasi ekonomi makro Kabupaten Tegal pada Triwulan ketiga tahun 2024 menunjukkan tantangan yang lebih kompleks akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Pada skala internasional, dampak ketidakpastian geopolitik dan ketergantungan impor membuat harga komoditas lokal rentan terhadap fluktuasi global. Di tingkat nasional dan regional, kebijakan energi serta perayaan musiman mendorong peningkatan permintaan, yang pada akhirnya memengaruhi kestabilan harga. Sementara itu, perubahan cuaca yang tidak terduga dan kenaikan harga bahan baku seperti pakan ternak semakin menekan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tegal.

1. Rekomendasi Pengendalian Inflasi dari hasil analisis Kabupaten Tegal diantaranya adalah :
2. **Penguatan Cadangan Stok dan Ketahanan Pangan Lokal** yakni mengoptimalkan stok pangan lokal melalui kerja sama dengan petani dan distributor di daerah sekitar agar lebih tahan terhadap fluktuasi pasokan dan permintaan;
3. **Diversifikasi Sumber Pasokan** dalam mengurangi ketergantungan pada impor melalui peningkatan produksi lokal dan kemitraan dengan wilayah lain untuk memastikan pasokan komoditas penting tetap stabil;
4. **Kebijakan Subsidi Energi dan Pengendalian Harga di Daerah** dalam memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga komoditas dan biaya energi;
5. **Pengembangan Teknologi Pertanian dan Mitigasi Cuaca Ekstrem** dalam upaya membantu petani untuk beradaptasi dengan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampak anomali iklim pada produksi;
6. **Pengawasan Distribusi dan Kebijakan Harga Acuan Lokal** untuk dapat mengawasi distribusi dan harga barang kebutuhan pokok agar kenaikan harga tidak terjadi secara berlebihan serta tetap terjangkau bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah pengendalian ini, Kabupaten Tegal diharapkan dapat lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi makro, baik yang bersumber dari luar negeri maupun yang bersifat domestik. Penguatan ketahanan ekonomi lokal dan strategi adaptif terhadap perubahan eksternal akan membantu menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Secara keseluruhan, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tegal dalam pengendalian inflasi adalah fluktuasi harga musiman, dampak kebijakan harga pusat, ketergantungan distribusi antarwilayah, serta dampak nilai tukar dan biaya produksi. Upaya pengendalian inflasi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat ketahanan pasokan lokal, meningkatkan stabilitas rantai distribusi, dan memberdayakan sumber daya lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasar luar daerah dan komponen impor. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Tegal dapat menekan dampak inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### **Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tegal pada Bulan Januari sampai dengan September berdasarkan kepada :**

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor : 050/76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis;
2. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 05/75/2022 tentang Peta jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 - 2024 Kabupaten Tegal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tegal;
3. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kabupaten Tegal Mingguan tanggal 05 Februari 2024 tentang Pengendalian Inflasi di Daerah berdasarkan surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : A 0604 tanggal 03 Februari 2024;
4. Rapat Koordinasi pengendalian inflasi berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 000.1.5/23/A.0667 tanggal 12 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran Kinerja TPID Kabupaten Tegal;
5. Rapat Koordinasi TPID Minggu ke-III (*Daring/Zoom Meeting*) berdasarkan Surat Undangan Sekda Kab. Tegal No : 000.1.5/23/A.0782 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 000.9/23/B.0373/2024 Tentang Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menyambut Idul Fitri 1445H/2024M tanggal 26 Maret 2024;
7. Rapat undangan Penanganan Inflasi Nomor : 000.7.3/23/473/2024 pada hari Senin tanggal 20 April 2024 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah sebagaimana mendasar pada Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/618/W.KPD/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah;
8. Rapat undangan Penanganan Inflasi Nomor : 000.1.5/23/517/2024 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 tentang Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024;
9. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tentang

- Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada hari Senin , tanggal 20 Mei 2024;
10. Menghadiri rapat koordinasi kegiatan Fasilitas Penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Nomor 000.1.6/20/630/VI/2024 pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal;
  11. Menyelenggarakan Rapat Penanganan Inflasi terkait Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dengan Tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga” Nomor 000.1.5/A.515 pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2024, dalam rangka menindaklanjuti surat Radiogram Kemendagri-RI Nomor 500.2.3/4061/Bangda tanggal 11 Juni 2024;
  12. Rapat Penanganan Inflasi dalam rangka menindaklanjuti surat Kemendagri Nomor 500.2.23/2822/SJ tanggal 22 Juni 2024 terkait Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;
  13. Rapat Pembahasan Program VBU (*Village Business University*) nomor 000.1.5/23/1865/2024 tanggal 02 Juli 2024;
  14. Rapat undangan BULOG Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 29 Juli 2024 di Semarang perihal Sosialisasi dan Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan dan Beras;
  15. Rapat Koordinasi Instrumen Penilaian Pengendalian Inflasi 2024 “*Inspiring Economics Effort Award*” tanggal 05 Agustus 2024 di Ruang Raoat LKC Bappedalitbang
  16. Rapat Diskusi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 14 Agustus 2024 sebagai Penggerak Ekonomi di Kawasan Perdesaan Mitra Desa Nusantara di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Tegal;
  17. Menghadiri undangan rapat Dinas Perikanan Kegiatan Kampanye GEMARIKAN di Balai Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal nomor 005/1399 tanggal 22 Agustus 2024;
  18. Rapat menghadiri undangan Dinas Perikanan dalam rangka Sosialisasi Kampanye GEMARIKAN “Memasyarakatkan Makan Ikan” tanggal 27 Agustus 2024 di Aula SMP Ma’arif 2 NU Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;
  19. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (RAKORPUSDA) Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tanggal 28 Agustus 2024;
  20. Menghadiri undangan rapat Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka Penguatan Cadangan Pangan Daerah Melalui Dana Desa Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
  21. Melaksanakan Rapat Diskusi Lanjutan Terkait Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Pasar dan Pengendalian Inflasi dengan cara Grosir Komoditas dengan Yayasan Mitra Desa Nusantara tanggal 11 September 2024 di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

Secara umum, mayoritas rapat yang dilaksanakan pada Triwulan Ketiga periode bulan Juli sampai dengan September 2024 melalui zoom dan di ikuti secara daring oleh TPID Kabupaten Tegal yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Tegal dan Sekretaris Daerah beserta Jajaran Pimpinan Struktural melalui rapat daring yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri. Beberapa arahan Pj. Bupati yang disampaikan dalam rapat pada anggota TPID Kabupaten Tegal adalah:

1. Rapat rutin TPID setidaknya sudah dilaksanakan secara bersama-sama di Ruang Rapat Sekda sebulan sekali. Selain itu juga diikuti oleh seluruh anggota TPID dari masing-masing tempat;
2. Jaga inflasi, jangan sampai ada catatan khusus di Kabupaten Tegal, khususnya gejolak harga komoditas;
3. Kabupaten Tegal bukan termasuk dalam daerah yg menjadi lokasi survei Indeks Harga

Konsumen (IHK). Sebagai gantinya, dilakukan survei Indeks Pergerakan Harga (IPH) 20 komoditas sebagai proksi inflasi. Pendataan harga dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, serta akan didampingi oleh BPS untuk meningkatkan kualitas dan validitas harga.

Namun terdapat beberapa rapat yang diselenggarakan berdasarkan mandat dari Kemendagri sebagai upaya tindak lanjut arahan dari Bapak Kemendagri beserta Pimpinan yang mewewakili dari Kementerian/Lembaga/Badan dan tentunya berkepentingan dalam urusan Inflasi. Terdapat 4 rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan dihadiri bersama dengan Kedinasan dan Forkompimda serta pelaku usaha maupun masyarakat yang turut ikut peran aktif didalamnya.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tegal pada Triwulan III (periode Juli hingga September) melibatkan upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas harga. Perkembangan utama yang biasanya dilakukan dalam pemantauan dan evaluasi ini, diantaranya dilakukan **Pemantauan Pergerakan Harga Komoditas Utama** harga pada berbagai komoditas penting dipantau secara intensif, termasuk bahan pangan seperti beras, sayuran, telur, daging, serta produk energi seperti BBM dan LPG. Data pergerakan harga ini diperoleh dari pasar-pasar lokal di Kabupaten Tegal untuk mengidentifikasi pola harga dan menentukan adanya lonjakan atau penurunan yang signifikan pada komoditas tertentu. Untuk hasil yang kedua adalah **Proses Pengidentifikasian Pemicu Inflasi**.

Selama Triwulan III, Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tegal periode Juli hingga September 2024 menunjukkan bahwa inflasi tetap menjadi isu strategis yang dikelola secara kolaboratif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait. Fokus utama pada triwulan ini adalah stabilisasi harga barang kebutuhan pokok melalui berbagai upaya seperti operasi pasar, penguatan pasokan, serta kelancaran distribusi.

Dari hasil pemantauan, komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah mengalami fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan dinamika pasokan. Operasi pasar yang dilakukan bersama Bulog di beberapa titik strategis membantu menjaga stabilitas harga beras. Selain itu, evaluasi dari TPID menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi di tengah tantangan kenaikan biaya logistik dan distribusi akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM). Dukungan Bank Indonesia berupa analisis data inflasi memberikan panduan strategis dalam merumuskan langkah mitigasi berbasis data.

TPID juga memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), untuk menjaga stabilitas harga melalui efisiensi rantai pasok. Evaluasi rapat koordinasi menunjukkan perlunya peningkatan integrasi data harga antar instansi serta penyelarasan program yang lebih responsif terhadap perubahan pasar. Salah satu inisiatif penting adalah peluncuran aplikasi pemantauan harga yang memberikan informasi harga komoditas secara real-time kepada masyarakat, meminimalkan spekulasi, dan meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, periode ini ditandai oleh komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui langkah-langkah proaktif. Rekomendasi dari evaluasi termasuk meningkatkan cadangan pangan lokal, memperluas program operasi pasar, dan membangun sistem informasi harga yang lebih terintegrasi. Upaya-upaya ini dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mendukung stabilitas harga hingga akhir tahun.

Yang ketiga dapat melihat dan mengevaluasi **Efektivitas Kebijakan Intervensi Pasar** untuk mengendalikan harga, berbagai intervensi pasar seperti operasi pasar murah sering dilakukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Misalnya, subsidi harga pada komoditas tertentu atau penambahan stok untuk memastikan barang-barang esensial tersedia di tingkat harga yang terjangkau. Kemudian yang keempat adalah **Menganalisis Dampak Kebijakan Transportasi dan Distribusi**. Kebijakan yang berhubungan dengan transportasi dan distribusi, seperti perbaikan infrastruktur dan regulasi distribusi, juga diperiksa karena masalah di sektor ini dapat mempengaruhi harga barang-barang tertentu. Pada periode Juli -September, terdapat beberapa gangguan distribusi sebagai akibat cuaca yang kurang bersahabat dan/atau fluktuatifnya harga bahan bakar sehingga biaya transportasi yang meningkat dapat berdampak langsung pada harga komoditas.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Cadangan Pangan dan Operasi Pasar TPID merekomendasikan peningkatan cadangan pangan lokal, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah, yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Program operasi pasar diusulkan diperluas ke lebih banyak lokasi dengan jadwal yang lebih terjadwal, terutama di wilayah rawan inflasi. Kerja sama dengan Bulog akan diperkuat untuk memastikan pasokan stabil, termasuk distribusi yang efisien ke pasar tradisional dan modern.

Diversifikasi produksi pangan lokal dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan ketergantungan pada pasokan luar daerah, direkomendasikan adanya diversifikasi produksi pangan lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas lokal dengan melibatkan masyarakat dalam budidaya tanaman strategis seperti cabai, bawang, dan hortikultura lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan harga akibat gangguan pasokan eksternal.

Pemanfaatan teknologi untuk transparansi harga untuk mengatasi spekulasi harga, TPID merekomendasikan pengembangan dan optimalisasi sistem informasi harga berbasis teknologi. Aplikasi pemantauan harga diusulkan untuk memberikan data real-time kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mendorong transparansi dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

Efisiensi rantai pasok dan pengawasan distribusi juga menjadi perhatian utama. TPID menyarankan untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan distributor. Pengawasan distribusi diperketat untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan barang kebutuhan pokok tersedia dengan harga wajar di pasar.

Berdasarkan pemantauan pada tahapan hasil evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan selama

periode ini, tim pemantauan inflasi menyusun laporan yang memuat tren inflasi, analisis penyebabnya, dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut, seperti memperkuat operasi pasar, memberikan insentif pada sektor pertanian lokal untuk meningkatkan pasokan, atau mengupayakan koordinasi yang lebih erat dengan instansi terkait. Rekomendasi yang kedua adalah dukungan sosial ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada bantuan langsung atau subsidi. Kebijakan ini merupakan bagian daripada tindak lanjut kebijakan yang berasal dari pusat yang notabene diterapkan pada kelompok masyarakat rentan uang terdampak langsung atas kenaikan harga. Hal ini memastikan daya beli tetap terjaga dan mengurangi dampak langsung inflasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menyiapkan tindakan korektif yang lebih cepat di triwulan selanjutnya, agar ketahanan ekonomi di Kabupaten Tegal tetap terjaga dan inflasi tidak membebani masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjaga inflasi dalam rentang yang terkendali, mendukung daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global dan regional.